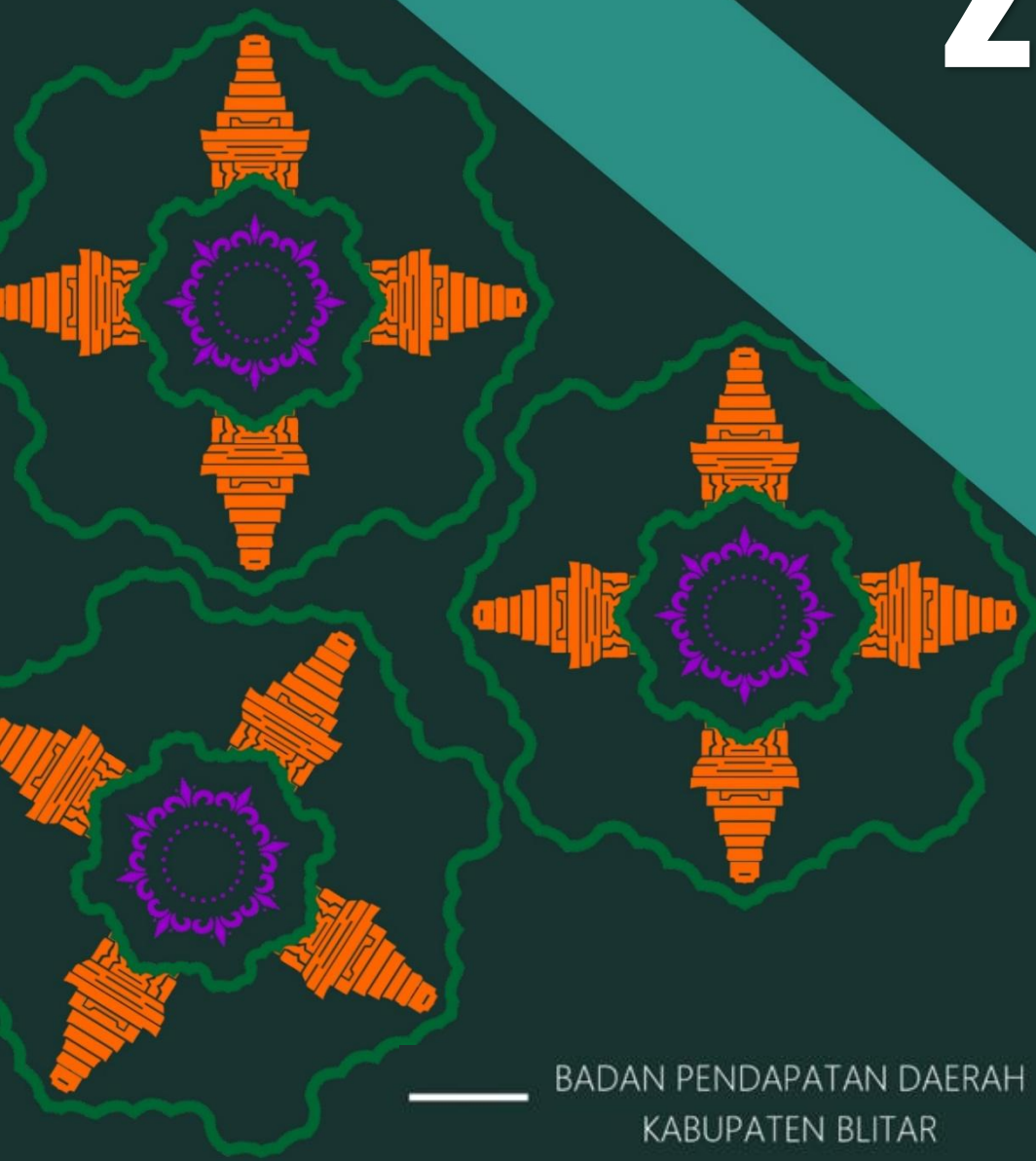




RENJA 2026



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar telah berhasil menyelesaikan penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rankhir Renja PD) Tahun 2026.

Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah ini disusun untuk dijadikan pedoman dan acuan bagi setiap elemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar sebagai pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan serta tugas pembantuan, dalam melaksanakan aktifitas, sehingga rencana penerimaan (target) yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Dan merupakan bentuk komitmen penuh organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dalam mewujudkan visi Kabupaten Blitar, yakni "Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya". Dengan demikian, dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen-dokumen yang lain, seperti Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

Usaha maksimal telah dilakukan dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, namun kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di masa mendatang. Oleh karena itu, masukan positif dan konstruktif bagi penyempurnaan dokumen ini tetap diperlukan.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan.

Blitar, Agustus 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR



ASMANINGAYU DEWI L.,ST.,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19780426 200212 2 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	26
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah	33
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	35
2.5 Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat	42
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	29
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah	30
3.3 Program dan Kegiatan	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	39
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	39
BAB V PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana pencapaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dalam prosesnya, penyusunan rencana kerja merupakan penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana kerja tahunan adalah target setting dari capaian indikator kinerja.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar perlu Menyusun Rencana Kerja Tahunan dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar 2021 – 2026.

Proses penyusunan Rencana Kerja dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja PD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan PD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan akhir RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penlaahan rancangan akhir RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik –Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 10/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 18 Seri E);
23. Peraturan Bupati Blitar Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar;
24. Peraturan Bupati Blitar Nomor 92 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 92/E).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 sehingga lebih terarah, efektif, dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran.
2. Sebagai acuan dalam rangka penyusunan RKA-DPA Tahun 2026

Tujuan

1. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya, perkiraan pencapaian tahun berjalan, dan kendala serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
2. Sebagai pedoman kebijakan penyusunan dan pelaksanaan R-APBD 2026 agar dapat terlaksana serta bermanfaat dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah.
3. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan Publik baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh kepada kesadaran dan kepatuhan masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah terutama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar perlu memberikan pelayanan publik yang baik dan profesional serta berkualitas.

Untuk mengetahui capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah maka perlu dikaji capaian kinerja dan realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 2.1
REALISASI KEUANGAN TAHUN 2024

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	6.996.841.477,00	6.974.407.456,00	96,20
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10.782.628.123,00	10.488.234.741,00	98,24
TOTAL		17.779.469.600,00	17.219.142.197,00	96,85

Capaian Realisasi Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah sebesar 96,85% atau sebesar 17.219.142.197,00 dari total pagu anggaran sebesar 17.779.469.600,00. Jika dilihat dari target belanja yang seharusnya dikeluarkan hasilnya tidak sampai 100%, dan akan dikatakan tidak tercapai secara kinerja belanja. Namun jika kita kembali kepada prinsip-prinsip ekonomi bahwa bagaimana kita mendapatkan hasil yang maksimal dengan jumlah anggaran belanja yang dikeluarkan hanya sedikit. Dan menurut kami secara prinsip dengan belanja yang efektif dan efisien namun target tercapai merupakan sebuah pencapaian yang baik.

Hal tersebut dapat kita lihat dari capaian pajak daerah pada tahun 2024 sebagai berikut :

TABEL 2.2
REALISASI PAJAK DAERAH TAHUN 2024

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	PAJAK HOTEL	240.000.000,00	173.751.355,00	72,40
2	PAJAK RESTO	5.000.000.000,00	6.610.626.228,81	132,21
3	PAJAK HIBURAN	2.007.049.808,00	1.900.785.411,00	94,71
4	PAJAK REKLAME	700.000.000,00	814.750.609,00	116,39
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	52.000.000.000,00	54.010.006.596,00	103,87
6	PAJAK PARKIR	200.000.000,00	170.825.950,00	85,41
7	PAJAK AIR TANAH	300.000.000,00	615.987.652,00	205,33
8	PAJAK MBLB	623.773.528,00	383.070.028,00	61,41
9	PBB	46.317.798.087,00	43.619.004.258,41	94,17
10	BPHTB	27.629.917.680,00	29.047.097.819,34	105,13
	PAJAK DAERAH	135.018.539.103	137.345.905.907,56	101,72

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan semua jenis pajak dapat tercapai targetnya dan bahkan melebihi dari target yang ditetapkan, dan jika kita sandingkan dengan anggaran belanja yang tidak 100% namun dengan target pajak yang tercapai secara keseluruhan maka dapat disimpulkan bahwa belanja yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar berjalan efektif dan efisien.

Dengan 2 capaian target belanja dan target pajak daerah di atas, maka kita akan masuk kedalam capaian IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

TABEL 2.3
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Optimalnya Penerimaan Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah	4,97%	5,16%	104%
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A (80,01)	BB (73,10)	BB

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa target IKU untuk 2024 semuanya terpenuhi dan sesuai harapan namun masih ada beberapa hal masih perlu ditingkatkan dalam implementasinya, karena walaupun secara keseluruhan semua target dapat tercapai namun semua meminimalisir hal-hal yang dapat mempengaruhi Penerimaan Asli Daerah utamanya Pajak Daerah.

Capaian Kinerja merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan/sub kegiatan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah disusun dalam perumusan Rencana Strategis Organisasi. Bapenda Kabupaten Blitar sendiri memiliki 2 Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Optimalnya Penerimaan Pajak Daerah
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian Indikator Kinerja diatas merupakan hasil kontribusi dari pelaksanaan 2 (dua) program dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Tingkat capaian kinerja setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar terbagi ke dalam 2 (dua) program, 6 (enam) Kegiatan, dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan yang mana target, realisasi, dan capaian indikator kinerja outpunya sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/output yang direncanakan ;

Adapun program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil keluaran pada renja yang direncanakan dan faktor penyebab serta upaya untuk mengatasi faktor penyebab adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak mencapai target sebanyak 44 ASN, karena pada tahun berjalan realisasi hanya sebesar 37 ASN. Hal ini disebabkan oleh adanya pegawai yang keluar melalui mutasi ke OPD lain maupun karena pensiun selama periode tahun 2021 sampai dengan 2024.

Meskipun terdapat penambahan ASN baru melalui formasi CPNS, penempatannya belum sepenuhnya mampu menggantikan kekosongan yang terjadi secara langsung akibat

pegawai yang keluar. Ketidaksesuaian waktu masuk dan keluarnya pegawai tersebut berdampak pada keterlambatan pemenuhan formasi, sehingga mempengaruhi realisasi anggaran serta pencapaian target output kegiatan.

TABEL 2.4
MUTASI PEGAWAI 2021 - 2024

Tahun	MASUK		KELUAR	
	CPNS Masuk	Mutasi Masuk OPD	Mutasi Keluar OPD	Pensiun
2021	3	4	3	2
2022	2	1	-	4
2023	4	5	5	1
2024	-	-	1	1
TOTAL	9	10	9	8

Selama periode tahun 2021 hingga 2024, tercatat total 19 ASN masuk dan 17 ASN keluar. Meskipun secara jumlah terjadi surplus pegawai, distribusi waktu mutasi masuk dan keluar yang tidak merata menyebabkan kekosongan formasi pada waktu tertentu. Kekosongan ini berdampak terhadap ketidaktercapaian target jumlah ASN aktif yang seharusnya menerima gaji dan tunjangan, serta memengaruhi efisiensi pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN terealisasi sebanyak 37 dokumen dari target 44 dokumen. Kegiatan ini mencakup penyusunan dokumen administratif seperti surat tugas, laporan kegiatan, dan pertanggungjawaban anggaran dari aktivitas bimtek, honorarium, dan perjalanan dinas.

Ketidaktercapaian target disebabkan oleh efisiensi pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan lebih sedikit dokumen dari rencana awal. Hal ini telah menjadi perhatian untuk perbaikan dalam perencanaan kegiatan tahun berikutnya.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

1) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 2 dokumen dari target sebanyak 2

dokumen rencana pengelolaan pajak daerah.

b. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 50 layanan dari target sebanyak 50 layanan dan konsultasi pajak daerah.

c. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 2 dokumen dari target sebanyak 2 dokumen hasil analisis.

d. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 22 kecamatan dari target sebanyak 22 kecamatan yang menghasilkan laporan pelaksanaan kegiatan sejumlah kecamatan.

e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 2 Jenis dari target 2 Jenis Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.

f. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 2 laporan.

g. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 10 laporan.

h. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 5 Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya.

i. Penetapan Wajib Pajak Daerah

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 795.711 dokumen penetapan pajak daerah.

j. Penagihan Pajak Daerah

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 795.711 dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah.

k. Pengendalian, Pemeriksaan, Pengawasan Pajak Daerah

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 100 dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah.

- I. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 4 laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah.

2) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 5 Paket instalasi yang disediakan.

- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 12 paket yang disediakan.

- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 10 paket yang disediakan.

- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 10 paket yang disediakan.

- e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 5 paket yang disediakan.

- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 4 dokumen yang disediakan.

- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 8 laporan penyelenggaraan.

b. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 2 unit peralatan dan mesin yang disediakan.

- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 12 Laporan.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 12 Laporan.
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 12 Laporan

- d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 12 Laporan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 5 Peralatan dan Mesin lainnya.
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 1 Gedung Kantor yang di rehabilitasi

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan pada periode ini menunjukkan bahwa hampir seluruh target kinerja hasil/keluaran telah tercapai 100% sesuai dengan yang direncanakan. Namun demikian, tidak terdapat program atau kegiatan yang realisasinya melebihi target output yang telah ditetapkan. Meskipun capaian output mencapai 100%, terdapat beberapa alokasi anggaran yang tidak terserap sepenuhnya. Hal ini dimungkinkan karena pelaksanaan kegiatan dilakukan secara lebih efisien dan efektif, sehingga dapat menghemat biaya tanpa mengurangi kualitas maupun kuantitas hasil yang dicapai.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan yaitu :

1) Faktor tidak tercapainya target pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN, sebagai berikut

- Adanya ASN yang Pensiun, sejumlah ASN yang sebelumnya masuk dalam perencanaan belanja pegawai telah memasuki masa pensiun sebelum atau selama tahun anggaran.
- Mutasi ASN ke Perangkat Daerah lain, ASN yang semula direncanakan berada dalam formasi Bapenda mengalami mutasi ke instansi lain, sehingga jumlah aktual ASN lebih sedikit dari target
- Perencanaan Personil tidak fleksibel terhadap dinamika SDM, ketidaksesuaian antara jumlah ASN dalam perencanaan awal dan kondisi aktual karena kurangnya penyesuaian terhadap kemungkinan dinamika kepegawaian (pensiun, mutasi, dll)

2) Faktor tercapainya target pada seluruh kegiatan kecuali Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sebagai berikut

- Perencanaan yang matang, perencanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan aktual dan dilakukan evaluasi secara berkala
- Tingkat Koordinasi Internal yang baik. Pelaksanaan kegiatan mendapat dukungan dari berbagai unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah
- Ketersediaan Sumber Daya, kegiatan dilaksanakan dengan dukungan sumber daya yang memadai dan penyerapan anggaran yang optimal

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD

1) Penurunan Realisasi Kinerja dalam Indikator Jumlah ASN yang difasilitasi

Dengan tidak tercapainya target jumlah ASN, maka indikator terkait pelayanan dan administrasi kepegawaian tidak sepenuhnya tercapai.

2) Potensi Ketidakesesuaian antara realisasi dan target renstra
Apabila pola ini berlanjut, maka capaian akumulatif terhadap indikator kinerja renstra khususnya dalam aspek manajemen kepegawaian, bisa mengalami deviasi dari target tahunan atau jangka menengah.

3) Efisiensi Anggaran tidak terencana

Meskipun terjadi efisiensi karena berkurangnya jumlah ASN, sisa anggaran yang tidak digunakan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal jika tidak ada mekanisme penyesuaian alokasi anggaran.

4) Dampak tidak langsung terhadap layanan

Penurunan jumlah ASN dapat berdampak pada beban kerja ASN yang tersisa dan berpotensi menurunkan kualitas layanan jika tidak ditangani

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diperlukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

1) Penyesuaian Data ASN

Melakukan update dan verifikasi berkala terhadap data kepegawaian, termasuk ASN yang akan pensiun dan berpotensi mutasi, sebelum proses perencanaan dan penganggaran.

2) Penguatan Sistem Informasi Kepegawaian

Mengintegrasikan perencanaan kepegawaian dengan sistem informasi SDM daerah untuk memastikan ketepatan jumlah dalam perencanaan kebutuhan pegawai.

3) Perencanaan SDM berbasis Analisis Beban Kerja (ABK)

Menyusun perencanaan ASN berdasarkan kebutuhan riil unit kerja dan mempertimbangkan pola pensiun/mutasi setiap tahun.

Berikut tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan tahun 2024:

TABEL 2.5
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD
s/d TAHUN 2024

Evaluasi Renja E.81

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output) / Sub Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode RPJMD/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Kr	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	6.875.033.279,00	100	39.401.195.413,00	100	6.996.841.477,00	100	6.730.907.455,00	200	96,20	200	46.132.102.868,00	200	200,00	46.132.102.868,00
2	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabe	100	5.740.592.449,00	100	10.853.903.958,00	100	5.397.856.600,00	100	5.169.852.673,00	100	95,78	100	16.023.756.631,00	100	279,13	16.023.756.631,00
3	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39	5.367.421.449,00	44	10.186.692.184,00	44	4.911.105.600,00	37	4.695.556.584,00	103,9	95,61	40,5	14.882.248.768,00	103,9	277,27	14.882.248.768,00
4	5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39	373.171.000,00	44	667.211.774,00	44	486.751.000,00	37	474.296.089,00	103,9	97,44	40,5	1.141.507.863,00	103,9	305,89	1.141.507.863,00

5	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12	466.696.300,00	12	915.793.090,00	12	534.908.517,00	12	532.804.722,00	100	99,61	12	1.448.597.812,00	100	310,39	1.448.597.812,00
6	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	11.195.000,00	4	23.673.000,00	5	16.189.905,00	5	16.149.900,00	180	99,75	9	39.822.900,00	180	355,72	39.822.900,00
7	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	207.140.900,00	8,5	349.294.090,00	12	204.543.046,00	3	203.374.422,00		99,43		552.668.512,00		266,81	552.668.512,00
8	5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	15.305.400,00	10,5	30.302.900,00	10	15.770.785,00	5	15.764.600,00	77,5	99,96	7,75	46.067.500,00	77,5	300,99	46.067.500,00
9	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	16.280.000,00	1	37.280.000,00	10	25.000.000,00	5	24.984.000,00	30	99,94	3	62.264.000,00	30	382,46	62.264.000,00
10	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	25	119.920.000,00	7,5	225.796.100,00	5	105.786.759,00	1	105.566.800,00		99,79		331.362.900,00		276,32	331.362.900,00
11	5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	20	7.230.000,00	2	12.900.000,00	4	5.000.000,00	1	4.490.000,00	7,5	89,80	1,5	17.390.000,00	7,5	240,53	17.390.000,00
12	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	40	89.625.000,00	12	236.547.000,00	8	162.618.022,00	8	162.475.000,00	50	99,91	20	399.022.000,00	50	445,21	399.022.000,00

			Konsultasi SKPD															
13	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100	64.820.000,00	100	213.478.000,00	100	246.066.320,00	100	243.500.000,00	100	98,96	100	456.978.000,00	100	705,00	456.978.000,00
14	5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	64.820.000,00	5,5	213.478.000,00	2	246.066.320,00		243.500.000,00		98,96		456.978.000,00		705,00	456.978.000,00
15	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Tepat Waktu	100	363.570.530,00	100	26.813.242.826,00	100	450.729.940,00	100	420.409.575,00	100	93,27	100	27.233.652.401,00	100	7.490,61	27.233.652.401,00
16	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	16.670.000,00	12	20.670.000,00	12	3.833.000,00	7	3.800.000,00		99,14		24.470.000,00		146,79	24.470.000,00
17	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	126.054.570,00	7,5	26.324.473.183,00	12	125.000.000,00	4	104.630.011,00		83,70		26.429.103.194,00		20.966,40	26.429.103.194,00
18	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	220.845.960,00	6	468.099.643,00	12	321.896.940,00	12	311.979.564,00	30	96,92	18	780.079.207,00	30	353,22	780.079.207,00
19	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam	100	239.354.000,00	100	604.777.539,00	100	367.280.100,00	100	364.340.485,00	100	99,20	100	969.118.024,00	100	404,89	969.118.024,00

		Daerah	Kondisi Baik															
20	5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	100.800.000,00	7,5	217.799.599,00	12	180.000.000,00	12	179.595.387,00	162,5	99,78	19,5	397.394.986,00	162,5	394,24	397.394.986,00
21	5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	42.554.000,00	3	91.541.900,00	5	77.280.100,00	5	77.249.150,00	160	99,96	8	168.791.050,00	160	396,65	168.791.050,00
22	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1	96.000.000,00	0,5	295.436.040,00	1	110.000.000,00	1	107.495.948,00	150	97,72	1,5	402.931.988,00	150	419,72	402.931.988,00
23	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	43.112.000.000,00	11.278.514.521,00	19.643.545.924,00	20.288.760.221,00	10.794.635.154,00	10.782.628.123,00	9.233.299.224,00	10.488.234.741,00		97,27		30.776.994.962,00			30.776.994.962,00
24	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		43.112.000.000,00	11.278.514.521,00	9.233.299.224,00	20.288.760.221,00	10.794.635.154,00	10.782.628.123,00	1.375.834.458,00	10.488.234.741,00		97,27		30.776.994.962,00		272,88	30.776.994.962,00
25	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	10	75.000.000,00		0,00	2	117.963.920,00	2	117.119.200,00		99,28		117.119.200,00		156,16	117.119.200,00
26	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	250	75.000.000,00		0,00	50	274.500.000,00	50	259.651.000,00		94,59		259.651.000,00		346,20	259.651.000,00
27	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan	1	643.840.000,00	1	1.333.877.710,00	2	399.164.400,00	2	383.501.950,00	300	96,08	3	1.717.379.660,00	300	266,74	1.717.379.660,00

			Kebijakan Pajak Daerah															
28	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	22	1.048.476.600,00	22	2.251.809.760,00	22	974.205.985,00	22	936.260.150,00	100	96,10	22	3.188.069.910,00	100	304,07	3.188.069.910,00
29	5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2	425.373.000,00	5	1.758.114.540,00	2	857.975.000,00	2	854.018.000,00	350	99,54	7	2.612.132.540,00	350	614,08	2.612.132.540,00
30	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2	1.017.950.000,00	4	2.022.150.000,00	2	1.612.024.787,00	2	1.569.543.587,00	300	97,36	6	3.591.693.587,00	300	352,84	3.591.693.587,00
31	5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	10	797.192.956,00	17	1.612.654.896,00	10	665.107.000,00	10	644.771.260,00	270	96,94	27	2.257.426.156,00	270	283,17	2.257.426.156,00
32	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	25	1.250.000.000,00	7	54.170.100,00	5	569.440.000,00	5	568.325.900,00	48	99,80	12	622.496.000,00	48	49,80	622.496.000,00
33	5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	796	998.647.451,00	795,7	1.944.018.351,00	795,7	165.235.000,00	795,7	161.050.000,00	100	97,47	796	2.105.068.351,00	100	210,79	2.105.068.351,00
34	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil	796	4.137.350.000,00	790,6	7.874.664.350,00	795,7	4.623.114.704,00	795,7	4.531.048.794,00	99,68	98,01	793	12.405.713.144,00	99,68	299,85	12.405.713.144,00

			Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah															
35	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100	302.517.514,00	60	392.782.514,00	100	279.150.600,00	100	225.128.000,00	160	80,65	160	617.910.514,00	160	204,26	617.910.514,00
36	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	507.167.000,00	6	1.044.518.000,00	4	244.746.727,00	4	237.816.900,00	250	97,17	10	1.282.334.900,00	250	252,84	1.282.334.900,00
TOTAL					18.153.547.800,00		59.689.955.634,00		17.779.469.600,00		17.219.142.196,00		193,47		76.909.097.830,00			76.909.097.830,00

Dan untuk Capaian Kinerja Belanja Badan Pendapatan Daerah Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.6
REALISASI KEUANGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	11.145.443.783	2.833.011.728	25,42%
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	15.518.721.416	2.978.450.347	19,19%
TOTAL		26.664.165.199	5.811.462.075	21,80%

Capaian Realisasi Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2025 sampai dengan triwulan II sebesar 21,80% atau sebesar Rp 5.811.462.075 dari total Pagu anggaran sebesar Rp 26.664.165.199. Jika dilihat dari capaian belanja, masih jauh dari target, hanya memang secara mapping belanja banyak kegiatan-kegiatan yang dianggarkan pada triwulan III dan IV.

Dan berikut adalah realisasi Pajak Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut :

TABEL 2.7
REALISASI PAJAK DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	PAJAK HOTEL	244.800.000,00	90.167.612,00	36,83
2	PAJAK RESTO	5.250.000.000,00	2.421.679.699,98	46,13
3	PAJAK HIBURAN	2.130.000.000,00	963.694.170,00	45,24
4	PAJAK REKLAME	700.000.000,00	380.385.045,00	54,34
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	52.000.000.000,00	24.015.397.315,00	46,18
6	PAJAK PARKIR	225.000.000,00	64.241.847,00	28,55
7	PAJAK AIR TANAH	300.000.000,00	246.699.277,00	82,23
8	PAJAK MBLB	655.500.000,00	110.611.578,80	16,87
9	PBB	46.317.798.087,00	17.527.905.027,00	37,84
10	BPHTB	27.669.455.430,50	10.665.245.319,63	38,55
11	OPSEN PKB	88.846.830.265,00	50.376.210.850,00	45,44
12	OPSEN BBNKB	25.132.454.486,00	14.855.485.800,00	59,11
PAJAK DAERAH		249.471.838.268,50	111.717.723.541,41	44,78

Capaian penerimaan Pajak Daerah pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 44,78%, dimana indikator pengukuran berasal dari perhitungan target sebesar Rp 249.471.838.268,50 sedangkan realisasi target yang telah ditetapkan pada tahun tersebut sebesar Rp 111.717.723.541,41. Dilihat dari capaian tersebut, melebihi target yang telah di tetapkan pada triwulan I dan dan triwulan II yang jumlah nya 40% yang artinya penerimaan PAD dari Pajak Daerah mengalami peningkatan sampai dengan pertengahan tahun 2025.

Lalu untuk Tahun 2026, Berikut target kinerja pendapatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026 :

TABEL 2.8
TARGET PAJAK DAERAH TAHUN 2025 - 2026

NO	URAIAN	TARGET 2025	TARGET 2026	KENAIKAN (%)
1	PBJT – Jasa Perhotelan	244.800.000,00	244.800.000,00	0,00
2	PBJT – Makanan Minuman	5.250.000.000,00	6.632.400.000,00	26,33
3	PBJT – Jasa Kesenian dan Hiburan	2.130.000.000,00	2.130.000.000,00	0,00
4	PAJAK REKLAME	700.000.000,00	827.000.000,00	18,14
5	PBJT – Tenaga Listrik	52.000.000.000,00	54.000.000.000,00	3,85
6	PBJT – Jasa Parkir	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00
7	PAJAK AIR TANAH	300.000.000,00	650.000.000,00	116,67
8	PAJAK MBLB	655.500.000,00	2.000.000.000,00	205,11
9	PBB	46.317.798.087,00	47.000.000.000,00	1,47
10	BPHTB	27.669.455.430,50	28.269.621.312,48	2,17
11	OPSEN PKB	88.846.830.265,00	93.160.749.600,00	4,86
12	OPSEN BBNKB	25.132.454.486,00	26.333.562.600,00	4,78
	PAJAK DAERAH	249.471.838.268,50	261.473.133.512,48	4,81

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kinerja Tahun 2024 telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra. Hal ini berarti masyarakat puas dengan pelayanan perpajakan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, hal ini berbanding lurus dengan pemenuhan target pada Tahun 2024, yang hampir semua jenis pajak. Sedangkan untuk Tahun 2025 pemenuhan target masih terus dilakukan optimalisasi-optimalisasi serta terus melaksanakan strategi-strategi yang sudah

direncanakan pada akhir Tahun 2024 agar pada Tahun 2025 ini Target Penerimaan Pajak Daerah dapat terealisasi dengan optimal.

Namun walaupun target tercapai, tetap perlu digaris bawahi bahwa masih banyak potensi-potensi Pajak Daerah yang masih belum maksimal tergali dan masih perlu di optimalkan. Maka dari itu diperlukan alternatif strategi serta inovasi agar pajak yang tercapai target nya pada tahun 2024, untuk tahun 2025 dapat meningkat dan lebih optimal.

Disamping berbicara mengenai potensi, edukasi dan sosialisasi serta kemudahan untuk masyarakat utamanya wajib pajak masih harus tetap dilaksanakan. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat adalah sesuatu yang harus terus dan tetap dijalankan untuk dapat terus menambah lagi kesadaran masyarakat perihal Pajak Daerah serta untuk masyarakat utamanya wajib pajak yang sudah mulai menyadari pentingnya membayar pajak adalah harus adanya inovasi yang dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pelayanan perpajakan.

Maka dari itu, pada Sub Bab ini juga disajikan tabel analisis pencapaian kinerja perangkat daerah, yang ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

TABEL 2.9
PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 SAMPAI
DENGAN 2026

No	Pendapatan Daerah/PAD/Pajak Daerah/ Indikator Sasaran	Target Renstra 2021 - 2026				Realisasi	
		2024	2025	2026 (RPJMD 2021 – 2026)	2027 (Target Bapenda 2025 – 2029)	2024	2025 (TW II)
1.	Pendapatan Daerah	3.000.911.379.359,00	3.008.662.291.206,00	3.026.614.437.422,00	2.694.407.115.623,71	2.664.284.871.040,07	1.351.285.934.914,94
2.	Pendapatan Asli Daerah	440.152.649.233,00	441.690.156.016,00	444.125.256.761,00	589.305.133.371,52	452.658.197.145,07	260.790.033.463,94
3.	Pajak Daerah	174.621.264.385,00	175.494.370.707,00	177.249.314.414,00	263.712.375.433,36	137.345.905.907,56	111.717.723.541,41
4.	Presentase Pajak Terhadap Total Pendapatan	5,82%	5,83%	5,86%	9,79%	5,16%	8,27%
No	Pendapatan Daerah/PAD/Pajak Daerah/ Indikator Sasaran	Target Bapenda 2025 - 2030				Realisasi	
		2024 (Masih Renstra 2021-2026)	2025	2026	2027	2024	2025 (TW II)
1.	Pendapatan Daerah	3.000.911.379.359,00	2.590.812.285.796,50	2.632.551.995.595,70	2.694.407.115.623,71	2.664.284.871.040,07	1.351.285.934.914,94
2.	Pendapatan Asli Daerah	459.526.054.923,05	571.286.316.706,52	572.140.906.185,93	589.305.133.371,52	452.658.197.145,07	260.790.033.463,94

3.	Pajak Daerah	135.018.539.103,00	247.471.838.268,50	255.958.106.063,48	263.712.375.433,36	137.345.905.907,56	111.717.723.541,41
4.	Persentase Pajak Terhadap Total PAD	29,38%	43,32%	44,74%	44,75%	30,34%	42,80%
		Target Real (Dengan Mengacu Renstra 2021 – 2026)				Realisasi	
No	Pendapatan Daerah/PAD/Pajak Daerah/ Indikator Sasaran	2024	2025	2026	2027	2024	2025 (TW II)
1.	Pendapatan Daerah	2.715.071.854.518,05	2.590.812.285.796,50	2.632.551.995.595,70	2.694.407.115.623,71	2.664.284.871.040,07	1.351.285.934.914,94
2.	Pendapatan Asli Daerah	459.526.054.923,05	558.186.249.937,50	577.553.452.634,93	589.305.133.371,52	452.658.197.145,07	260.790.033.463,94
3.	Pajak Daerah	135.018.539.103,00	245.920.045.935,00	261.473.133.512,48	263.712.375.433,36	137.345.905.907,56	111.717.723.541,41
4.	Presentase Pajak Terhadap Total Pendapatan	4,97%	9,41%	9,72%	9,79%	5,16%	8,27%
		Target Real (Dengan Mengacu Target Bapenda 2025 – 2029)				Realisasi	
No	Indikator	2024	2025	2026	2027	2024	2025 (TW II)
1.	Pendapatan Daerah	2.715.071.854.518,05	2.590.812.285.796,50	2.640.251.995.595,70	2.702.107.115.623,72	2.664.284.871.040,07	1.351.285.934.914,94
2.	Pendapatan Asli	459.526.054.923,05	571.286.316.706,52	577.553.452.634,93	589.305.133.371,52	452.658.197.145,07	260.790.033.463,94

	Daerah						
3.	Pajak Daerah	135.018.539.103,00	247.471.838.268,50	261.473.133.512,48	263.712.375.433,36	137.345.905.907,56	111.717.723.541,41
4.	Presentase Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah	29,38%	43,32%	45,27%	44,75%	30,34%	42,80%

Tabel diatas berisikan Target Renstra 2021 – 2026, Target Bapenda 2025 – 2030, Target Real dengan Mengacu Renstra 2021 – 2026, Target Real Bapenda 2025 – 20230 beserta realisasinya. Jika ditarik kesimpulan, Kinerja **Pendapatan Daerah** dan **PAD Kabupaten Blitar** menunjukkan capaian yang cukup baik dan stabil, dengan tren peningkatan target yang realistis. **Pajak daerah berhasil menjadi motor utama PAD**, dengan capaian yang melampaui target pada 2024, meskipun realisasi 2025 masih perlu percepatan. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang mencapai lebih dari 40% menandakan kekuatan sekaligus tantangan: di satu sisi menjadi tulang punggung, di sisi lain menuntut Bapenda untuk menjaga stabilitas dan mencari inovasi sumber PAD lainnya. Secara kualitatif, capaian ini membuktikan adanya **efektivitas strategi Bapenda dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pajak**, namun tetap memerlukan **penguatan digitalisasi, validasi data, peningkatan SDM, serta kesadaran masyarakat** agar target 2025–2030 dapat tercapai.

TABEL 2.10
 PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 SAMPAI
 DENGAN 2026
 DENGAN MENGGUNAKAN RENSTRA 2021 – 2026
 DAN TARGET 2025 - 2029

	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Badan Pndatan Daerah (2021 – 2026)				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (RPJMD 2025- 2029) (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 s/d Juli (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (RPJMD 2025- 2029) (n+1)	Analisis
1	Nilai SAKIP	N/A	-	A (80,01)	A (80,01)	A (80,01)	BB (75,00)	BB (73,10)	-	BB (74,00)	BB (75,00)	
2	Presentase Pajak Terhadap Total Pendapatan	N/A	-	5,82	5,83	5,86	9,79	5,11	8,40	5,86	9,79	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Badan Pendaan Daerah (2025 – 2029)				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 s/d Juli (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Analisis
1	Rasio PAD terhadap Pendapatan	N/A	-	16,93	21,54	21,67	21,81	16,99	19,35	21,67	21,81	
2	Persentase Peningkatan PAD	N/A	-	9,95	23,33	2,50	3,00	9,95	-	2,50	3,00	
3	Nilai SAKIP	N/A	-	A (80,01)	BB (74,00)	BB (75,00)	BB (76,00)	BB (73,10)	-	BB (74,00)	BB (75,00)	

Secara umum, kinerja Bapenda Kabupaten Blitar menunjukkan tren positif terutama pada kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah yang terus meningkat signifikan, sekaligus menegaskan peran pajak sebagai penopang utama kemandirian fiskal daerah. Namun demikian, capaian **nilai SAKIP** masih berada di bawah target Renstra sehingga perlu penguatan tata kelola manajemen kinerja dan budaya akuntabilitas. Di sisi lain, target peningkatan PAD tahun 2025 ditetapkan cukup ambisius sehingga membutuhkan strategi ekstra berupa intensifikasi, ekstensifikasi, validasi data, serta digitalisasi layanan pemungutan. Meskipun rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah menunjukkan lonjakan positif, ketergantungan yang tinggi pada pajak daerah perlu diimbangi dengan optimalisasi sumber PAD lainnya agar struktur pendapatan daerah lebih seimbang dan berkelanjutan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

1. Tingkat kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah

Kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2024 secara umum menunjukkan capaian positif, hal ini tercermin dari :

- a. Tercapainya target penerimaan pajak daerah hampir seluruh jenis pajak
- b. Tercapainya 2 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Nilai SAKIP mencapai predikat “BB” dan Persentase pajak daerah terhadap total pendapatan daerah melampaui target Renstra.
- c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perpajakan menunjukkan tren yang meningkat, seiring dengan optimalisasi strategi pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Namun demikian, masih terdapat hal-hal kritis yang perlu diperhatikan, yaitu masih adanya potensi pajak yang belum tergali secara optimal, kesenjangan antara data potensi dan realisasi di beberapa jenis pajak, dan ketergantungan pada strategi konvensional tanpa didukung inovasi digital yang masif dalam hal pelayanan dan penggalan potensi.

2. Permasalahan dan Hambatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Permasalahan utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD mencakup:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM): Ketidaksesuaian antara perencanaan kebutuhan ASN dengan realisasi aktual akibat pensiun dan mutasi pegawai menyebabkan beberapa sub kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan administrasi ASN, tidak mencapai target.
- b. Fleksibilitas anggaran: Sisa anggaran belanja pegawai yang tidak terserap tidak dapat segera dialihkan karena belum tersedianya mekanisme penyesuaian anggaran yang fleksibel.
- c. Keterbatasan Inovasi Digital: Pelayanan perpajakan belum sepenuhnya berbasis sistem digital terintegrasi yang memudahkan wajib pajak dalam mengakses dan membayar kewajiban perpajakan.

3. Dampak terhadap Capaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta Program Nasional/Internasional (SPM dan SDGs)

Permasalahan yang ada dapat menimbulkan dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, khususnya dalam aspek peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel serta peningkatan pendapatan asli daerah. Dampak tersebut antara lain:

- a. Penurunan efisiensi dalam pengelolaan kepegawaian (SDM) yang dapat berimplikasi pada rendahnya efektivitas pelayanan publik.
- b. Berkurangnya kemampuan optimalisasi potensi pendapatan daerah yang dapat menghambat pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- c. Ketidakselarasan antara kinerja aktual dan arah pencapaian tujuan SDGs, khususnya pada indikator-inidikator tata kelola yang baik, layanan publik berkualitas, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

a. Tantangan:

- Adaptasi terhadap dinamika pegawai seperti pensiun dan mutasi yang belum tertangani secara responsif dalam perencanaan tahunan.
- Kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak akibat belum optimalnya penggalian potensi objek pajak.
- Perubahan ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik yang semakin mengarah ke digitalisasi dan kemudahan akses.

b. Peluang:

- Ketersediaan sistem informasi dan data perpajakan yang dapat dioptimalkan untuk perencanaan dan pelayanan.
- Dukungan kebijakan digitalisasi layanan publik yang dapat digunakan untuk mempercepat transformasi pelayanan perpajakan berbasis teknologi.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak sebagai hasil dari edukasi dan sosialisasi yang terus dilakukan.

5. Formulasi Isu-Isu penting

Berdasarkan uraian di atas, maka isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perencanaan program dan kegiatan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Ketidaksesuaian perencanaan kepegawaian terhadap kondisi riil ASN
 - Melakukan penyesuaian dan verifikasi data ASN secara berkala sebelum penyusunan anggaran.
 - Mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan perencanaan program.
- b. Masih belum optimalnya penggalan potensi pajak daerah
 - Melakukan pemutakhiran data objek pajak dan kajian potensi secara berkala.
 - Menyusun strategi intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis data spasial dan analitik.
- c. Kesenjangan antara kebutuhan layanan dan ekspektasi masyarakat
 - Mendorong inovasi layanan berbasis digital, seperti layanan pembayaran pajak online, notifikasi pajak otomatis, dan sistem pengaduan berbasis aplikasi.
 - Memperluas edukasi dan sosialisasi perpajakan berbasis komunitas dan media sosial.
- d. Efisiensi anggaran yang tidak terkelola secara optimal
 - Mendorong kebijakan fleksibilitas penggunaan anggaran pada perubahan jumlah pegawai.
 - Mengembangkan sistem perencanaan anggaran berbasis kebutuhan dinamis (flexible budgeting).

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan terhadap rancangan awal RKPD yaitu menganalisa indikator kinerja serta anggaran program dan kegiatan untuk disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pemungutan pajak daerah Tahun berjalan. Proses tersebut dilakukan untuk memetakan temuan-temuan apa saja yang muncul setelah proses analisis dilaksanakan.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal
RKPD tahun 2026 Kabupaten Blitar

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Pendapatan Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja pada Program		12.081.470.831,68	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Pendapatan Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja pada Program	85%	12.081.470.831,68		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan	-	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan	-	-	-	
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perangkat Daerah	12 dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perangkat Daerah	12 dokumen	-	-	
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Kinerja dan ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Kinerja dan ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	-	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang akuntabel	-	10.175.108.185,68	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang akuntabel	-	10.175.108.185,68		
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang/bulan	9.809.394.090,68	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang	9.809.394.090,68		
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah ASN yang disediakan	44 dokume	365.714.095,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah ASN yang disediakan	44 orang	365.714.095,00		

			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	n				Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	-	659.323.045,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	-	659.323.045,00	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	4 paket	20.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlahkomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	5 paket	20.000.000,00	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	236.423.045,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jenis peralatandanperlengkapantor yang disediakan	4 paket	236.423.045,00	
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	25.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenisperalatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	25.000.000,00	
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket logistik kantor yang dsediakan	4 paket	64.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket logistik kantor yang dsediakan	4 paket	64.000.000,00	
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	106.900.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	106.900.000,00	
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Umlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	10.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Umlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	10.000.000,00	
7.	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah paket bahan/Meterial yang disediakan	-	-	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah paket bahan/Meterial yang disediakan	-	-	
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	197.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	197.000.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang tepat Sasaran		171.884.721,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang tepat Sasaran		171.884.721,00	

1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	10 unit	171.884.721,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	10 unit	171.884.721,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase jasa Penuunjnag Urusan pemerintahan daerah yang disediakan tepat waktu		584.654.880,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa Penuunjnag Urusan pemerintahan daerah yang disediakan tepat waktu		584.654.880,00	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3.833.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3.833.000,00	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	183.720.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	183.720.000,00	
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penevedian jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	12 laporan	397.101.880,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penevedian jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	12 laporan	397.101.880,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase barang milik daerah Penunjnag Urusan pemerintah Daerah dalam Kondisi baik	100 %	490.500.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah Penunjnag Urusan pemerintah Daerah dalam Kondisi baik	100 %	490.500.000,00	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan Bayarkan pajak dan perizinannya	18 unit	207.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan Bayarkan pajak dan perizinannya	18 unit	207.000.000,00	
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan Mesin lainnya yang dipelihara	58 unit	83.500.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan Mesin lainnya yang dipelihara	58 unit	83.500.000,00	
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	1 unit	200.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	1 unit	200.000.000,00	

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	2,60%	14.597.730.070,32	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan pajak Daerah	4,81%	14.597.730.070,32	(Untuk Target Indikator ada Perubahan) Karena Ada Kenaikan Pada Pajak Daerah : 1. OPSEN PKB 2. OPSEN BBNKB
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Persentase realisasi penerimaan Pajak daerah	100%	14.597.730.070,32	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan Pajak daerah	100%	14.597.730.070,32	
1.	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 dokumen	85.974.800,00	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 dokumen	85.974.800,00	
2.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis pajak Daerah serta Pengembangan pajak daerah dan kebijakan Daerah	27 dokumen	307.659.900,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis pajak Daerah serta Pengembangan pajak daerah dan kebijakan Daerah	27 dokumen	307.659.900,00	
3.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	32 laporan	1.250.000.000,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	32 laporan	1.250.000.000,00	
4.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	14 unit	1.089.628.400,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	14 unit	1.089.628.400,00	
5.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Daerah, Subyek Pajak dan Wajib pajak daerah	4 laporan	3.017.621.950,00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Daerah, Subyek Pajak dan Wajib pajak daerah	40 laporan	3.017.621.950,00	
6.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan dan	10 laporan	200.000.000,00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan dan	10 laporan	200.000.000,00	

			Pelaporan basis data Pajak Daerah					Pelaporan basis data Pajak Daerah			
7.	Penilaian Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanahdan Bangunan (BPHTB)		Jumlah obyek Pajak yang disesuaikan NJOPNya	25 Obyek Pajak	185.000.000,00		Penilaian Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanahdan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek Pajak yang disesuaikan NJOPNya	5 Obyek Pajak	185.000.000,00	
8.	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	821.700 dokumen	45.120.000,00		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	821.700 dokumen	45.120.000,00	
9.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Junlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1600 layanan	180.000.000,00		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Junlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1600 layanan	180.000.000,00	
10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Data pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penilaian dan verifikasi	-	-		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penilaian dan verifikasi	-	-	
11.	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Jenis Dokumen Hasil pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	740.530 dokumen	4.237.171.554,32		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Hasil pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	780.200 dokumen	4.237.171.554,32	
12.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah dokumen Hasil Penyelesaian Kebertan pajak Daerah	-	-		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Hasil Penyelesaian Kebertan pajak Daerah	-	-	
13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan pajak Daerah	495 dokume n	3.218.000.000,00		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan pajak Daerah	495 dokumen	3.218.000.000,00	
14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi daerah	4 laporan	556.553.466,00		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi daerah	4 laporan	556.553.466,00	
15.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Jumlah laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 laporan	225.000.000,00		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 laporan	225.000.000,00	
	TOTAL				26.679.200.902,00		TOTAL				26.679.200.902,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/ kegiatan yang diusulkan pada pemangku kepentingan didapatkan dari usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD, dan Usulan Teknokratis. Kemudian usulan-usulan tersebut diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada tingkat Badan Pendapatan Daerah. Usulan yang datang dari masyarakat pada umumnya terkait dengan digitalisasi pelayanan namun tidak diusulkan melalui mekanisme musrenbang sedangkan usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2026 tidak ada. Berikut kami sajikan tabel 2.5 terlampir.

Tabel T-C.2.5
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Blitar**

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional yang terkait dengan Bapenda Kabupaten Blitar jika disesuaikan dengan Catur Darma Ketiga dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 yaitu *“Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat”* memiliki keterkaitan langsung dengan **Asta Cita 7**, yaitu *“Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan, dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan”*. Arah kebijakan ini pada tingkat nasional tercermin dalam **RPJMN 2025–2029**, khususnya **Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi**.

Prioritas Nasional tersebut menekankan pada terwujudnya birokrasi yang berdampak, pelayanan publik yang bersih dan akuntabel, serta pemerintahan digital yang mampu merespon kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Berikut beberapa fokus kebijakan yang relevan bagi Bapenda Kabupaten Blitar antara lain:

1. **Transformasi pelayanan publik berbasis elektronik** guna meningkatkan kualitas layanan, memperluas akses masyarakat, dan mengurangi potensi praktik maladministrasi.
2. **Pemerintah digital (digital government)** melalui integrasi sistem informasi dan interoperabilitas data untuk memperkuat efisiensi dan transparansi proses pelayanan.
3. **Penguatan integritas aparatur** dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi berbasis teknologi, termasuk sistem pengawasan daring dan pelaporan yang terbuka.

Badan Pendapatan Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan nasional tersebut melalui pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Sejalan dengan itu, arah kebijakan Bapenda pada tahun 2026 akan difokuskan pada:

1. Optimalisasi Pajak MBLB dengan Melaksanakan Tata Kelola Pemungutan Pajak MBLB dengan adanya Pos Pantau MBLB;

2. SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak);
3. Prabu Berkelas (Progam Pendataan Bangunan Bersama Kelurahan dan Desa);
4. Kolaborasi Penyampaian dan Pemungutan PBB-P2 bersama Desa/Kelurahan;
5. Pegasus (Penilaian Bangunan Khusus);
6. Update NJOP;
7. Peningkatan Aplikasi SIP MASE, E-SPTPD, E-BPHTB;
8. Peningkatan Sistem Informasi Data Online Pajak Daerah (SIRIDOAJA) berbasis android dengan melakukan Update basis data secara periodik;
9. MOU dengan Aparat Penegak Hukum dalam bidang perpajakan;
10. Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan pemeriksaan pajak daerah;
11. Cost Sharing dan Role Sharing OPSEN PKB dan BBNKB;
12. Pelaksanaan Bulan Panutan dan Gebyar Pajak Daerah;
13. Pendataan Bangunan Bersama Desa/Kelurahan;
14. Pemasangan Baliho – baliho pada titik-titik strategis;
15. Memperluas akses kemudahan pembayaran dengan menjalin Kerjasama dengan semua e-commers, merchant dan perbankan meliputi lembaga keuangan non perbankan lainnya serta pengembangan dan perluasan kanal pembayaran melalui QRIS.

Dengan sinkronisasi ini, program dan kegiatan Bapenda Kabupaten Blitar pada tahun 2026 diharapkan mampu mendukung pencapaian misi Bupati, Asta Cita 7, serta kontribusi nyata terhadap sasaran nasional dalam RPJMN 2025– 2029.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Bapenda Kabupaten Blitar Tahun 2026 didasarkan pada hasil identifikasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi **7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan, dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.**

1. Tujuan Perangkat Daerah

Sejalan dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Blitar maka tujuan yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar adalah Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan yang muara atau tujuan besarnya adalah “Terwujudnya Kemandirian Fiskal Melalui Penerimaan PAD”

Selain dari Indikator Kinerja Utama, Badan Pendapatan Daerah memiliki Indikator Kinerja Kunci yang disesuaikan dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, yang disajikan pada Tabel berikut :

Indikator Kinerja Kunci (Badan Pendapatan Daerah)
Tahun 2025 – 2030

Kinerj Kunci	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	21,54%	21,67%	21,81%	21,98%	22,19%	22,47%

3.3 Program dan Kegiatan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, maupun kegiatan-kegiatan spesifik sebagai perwujudan Optimalisasi Penerimaan PAD Kabupaten Blitar.

Adapun program prioritas untuk pemenuhan kinerja utama Perangkat Daerah adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan indikator peningkatan proporsi Pajak Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Selain itu, terdapat 12 (dua belas) isu strategis prioritas yang menjadi perhatian dan memberi pengaruh bagi Badan Pendapatan Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yaitu :

1. Optimalisasi Pajak Daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi;
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemungutan, pembayaran, dan pengawasan pajak daerah;
3. Kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan;
4. Koordinasi lintas perangkat daerah dalam mendukung peningkatan PAD;
5. Kualitas data dan basis pajak daerah yang perlu lebih valid dan terintegrasi;
6. Sumber daya manusia aparatur yang perlu terus ditingkatkan kompetensinya;
7. Efektivitas regulasi dan kebijakan pajak daerah dalam mendukung peningkatan penerimaan;
8. Penguatan pengawasan dan pengendalian penerimaan daerah;

9. Inovasi layanan publik dalam mempermudah wajib pajak memenuhi kewajibannya;
10. Kerjasama dengan instansi vertikal, dunia usaha, dan masyarakat dalam; meningkatkan kepatuhan dan kontribusi;
11. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan;
12. Dukungan sarana prasarana pelayanan yang memadai, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.

Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam tahun 2025 terdapat 2 Program, 7 Kegiatan, 34 Sub Kegiatan yang meliputi sebagai berikut:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Penyediaan Bahan/ Material
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah
 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Pengelolaan dan penatausahaan benda berharga;
 - a. Perencanaan pengelolaan pajak daerah
 - b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penvusunan Kebiiakan Pajak Daerah
 - c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 - e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - f. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - g. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - h. Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - i. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - j. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 - k. Penagihan Pajak Daerah
 - l. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
 - m. Pengendalian, Pemeriksaan, Pengawasan Pajak Daerah
 - n. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

o. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Dalam Rancangan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar tahun 2021 - 2026, program dan kegiatan dikategorikan kedalam program/kegiatan lokalitas Perangkat Daerah, Berikut disajikan Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027 **tabel 3.3 terlampir.**

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 sesuai
Kondisi Rill
Kabupaten Blitar

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Keuangan				26.679.200.902,00				28.516.820.207,40
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja pada Program			12.081.470.831,68			85%	12.478.537.108,98
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan	Bapenda	-	-	APBD KAB		-	-
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perangkat Daerah	Bapenda	12 dokumen	-	APBD KAB		12 dokumen	-
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda	4 Laporan	-	APBD KAB		4 Laporan	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang akuntable	Bapenda	-	10.175.108.185,68	APBD KAB		100%	11.407.875.543,00
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	44 orang/bulan	9.809.394.090,68	APBD KAB		44 orang/bulan	11.037.875.543,00
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bapenda	44 Dokumen	365.714.095,00	APBD KAB		44 Dokumen	370.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntable	Bapenda	-	659.323.045,00	APBD KAB			670.000.000,00
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Bapenda	4 paket	20.000.000,00	APBD KAB		4 Paket	20.000.000,00
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis peralatandan perlengkapan kantor yang disediakan	Bapenda	4 paket	236.423.045,00	APBD KAB		4 Paket	240.000.000,00
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenisperalatan Rumah Tangga yang disediakan	Bapenda	4 paket	25.000.000,00	APBD KAB		4 Paket	25.000.000,00
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket logistik kantor yang dsediakan	Bapenda	4 paket	64.000.000,00	APBD KAB		4 Paket	65.000.000,00
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Bapenda	4 paket	106.900.000,00	APBD KAB		4 Paket	110.000.000,00
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang	Bapenda	12 dokumen	10.000.000,00	APBD KAB		12 Dokumen	10.000.000,00

		disediakan							
	7. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/Material yang disediakan	Bapenda	-	-	APBD KAB	-	-	-
	8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bapenda	12 laporan	197.000.000,00	APBD KAB	12 Laporan	200.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penggadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang tepat Sasaran	Bapenda		171.884.721,00	APBD KAB			200.000.000,00
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Bapenda	10 unit	171.884.721,00	APBD KAB	10 unit	200.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah yang disediakan tepat waktu	Bapenda		584.654.880,00	APBD KAB			586.654.880,00
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bapenda	12 laporan	3.833.000,00	APBD KAB	12 laporan	3.833.000,00	
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Bapenda	12 laporan	183.720.000,00	APBD KAB	12 laporan	185.720.000,00	
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Peneyedian jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	Bapenda	12 laporan	397.101.880,00	APBD KAB	12 laporan	397.101.880,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah dalam Kondisi baik	Bapenda	100 %	490.500.000,00	APBD KAB	100%		497.000.000,00
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan Bayarkan pajak dan perizinannya	Bapenda	18 unit	207.000.000,00	APBD KAB	20 unit	207.000.000,00	
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan Mesin lainnya yang dipelihara	Bapenda	58 unit	83.500.000,00	APBD KAB	59 unit	90.000.000,00	
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Bapenda	1 unit	200.000.000,00	APBD KAB	1 unit	200.000.000,00	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan pajak Daerah		2,60%	14.597.730.070,32			3,03%	15.155.289.784,40
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan Pajak daerah	Bapenda	100%	14.597.730.070,32	APBD KAB	100%	15.155.289.784,40	
	1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	2 dokumen	85.974.800,00	APBD KAB	2 dokumen	104.432.243,12	
	2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis pajak Daerah serta Pengembangan pajak daerah dan kebijakan Daerah	Bapenda	27 dokumen	307.659.900,00	APBD KAB	29 dokumen	330.670.000,00	

3.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	32 laporan	1.250.000.000,00	APBD KAB		33 laporan	1.338.376.241,67
4.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	14 unit	1.089.628.400,00	APBD KAB		16 unit	1.100.000.000,00
5.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Daerah, Subyek Pajak dan Wajib pajak daerah	Bapenda	4 laporan	3.017.621.950,00	APBD KAB		4 laporan	3.225.000.000,00
6.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan basis data Pajak Daerah	Bapenda	10 laporan	200.000.000,00	APBD KAB		10 laporan	250.000.000,00
7.	Penilaian Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanahdan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyekt Pajak yang disesuaikan NJOPNya	Bapenda	25 Objek Pajak	185.000.000,00	APBD KAB		25 objek pajak	185.000.000,00
8.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Bapenda	821.700 dokumen	45.120.000,00	APBD KAB		831.800 dokumen	50.000.000,00
9.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Junlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda	1600 layanan	180.000.000,00	APBD KAB		1700 layanan	200.000.000,00
10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penilaian dan verifikasi	Bapenda	-	-	APBD KAB		-	-
11.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Hasil pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	740.530 dokumen	4.237.171.554,32	APBD KAB		749.620 dokumen	4.301.811.299,61
12.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Hasil Penyelesaian Kebertan pajak Daerah	Bapenda	-	-	APBD KAB			-
13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan pajak Daerah	Bapenda	495 Dokumen	3.218.000.000,00	APBD KAB		495 dokumen	3.250.000.000,00
14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi daerah	Bapenda	390 laporan	556.553.466,00	APBD KAB		420 laporan	570.000.000,00
15.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bapenda	4 laporan	225.000.000,00	APBD KAB		4 laporan	250.000.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar menyusun rencana kerja yang mengacu pada dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026. Penyusunan rencana ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah serta mendayagunakan sumber daya secara efektif dan efisien sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Rencana kerja yang disusun telah dituangkan dalam program dan kegiatan yang tercantum pada Tabel 4.1, yang mencakup dua program utama dengan delapan kegiatan dan tiga puluh lima sub kegiatan. Total kebutuhan pendanaan untuk Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp 26.679.200.902,00 dengan target capaian kinerja dan indikator yang telah ditetapkan, serta didanai melalui sumber APBD Kabupaten Blitar.

Setiap program dan kegiatan dirancang dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas terhadap isu-isu strategis, termasuk pengarusutamaan gender. Sebagai bagian dari komitmen ini, telah dipilih sub kegiatan yang mendukung penganggaran responsif gender, yaitu kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah.

Rencana kerja dan pendanaan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik, mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Keluaran
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja pada Program
5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan
5.02.01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perangkat Daerah
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang akuntabel
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan Rumah Tangga yang disediakan
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket logistik kantor yang dsediakan
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang undangan yang disediakan
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/Meterial yang disediakan
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang tepat Sasaran
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan
5.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa Penuunjang Urusan pemerintahan daerah yang disediakan tepat waktu
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik

5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio pajak daerah terhadap pendapatan daerah
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi Capaian Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah

5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 sesuai
Kondisi Rill
Kabupaten Blitar

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Keuangan				26.679.200.902,00				28.516.820.207,40
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja pada Program			12.081.470.831,68			85%	12.478.537.108,98
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan	Bapenda	-	-	APBD KAB	-	-	-
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perangkat Daerah	Bapenda	12 dokumen	-	APBD KAB	12 dokumen	-	-
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda	4 Laporan	-	APBD KAB	4 Laporan	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang akuntabel	Bapenda	-	10.175.108.185,68	APBD KAB	100%		11.407.875.543,00
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	44 orang/bulan	9.809.394.090,68	APBD KAB	44 orang/bulan		11.037.875.543,00
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bapenda	44 Dokumen	365.714.095,00	APBD KAB	44 Dokumen		370.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	Bapenda	-	659.323.045,00	APBD KAB			670.000.000,00
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Bapenda	4 paket	20.000.000,00	APBD KAB	4 Paket		20.000.000,00
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis peralatandan perlengkapan kantor yang disediakan	Bapenda	4 paket	236.423.045,00	APBD KAB	4 Paket		240.000.000,00
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenisperalatan Rumah Tangga yang disediakan	Bapenda	4 paket	25.000.000,00	APBD KAB	4 Paket		25.000.000,00
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket logistik kantor yang dsediakan	Bapenda	4 paket	64.000.000,00	APBD KAB	4 Paket		65.000.000,00
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Bapenda	4 paket	106.900.000,00	APBD KAB	4 Paket		110.000.000,00
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang	Bapenda	12 dokumen	10.000.000,00	APBD KAB	12 Dokumen		10.000.000,00

		disediakan							
	7. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/Material yang disediakan	Bapenda	-	-	APBD KAB	-	-	-
	8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bapenda	12 laporan	197.000.000,00	APBD KAB	12 Laporan	200.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penggadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang tepat Sasaran	Bapenda		171.884.721,00	APBD KAB			200.000.000,00
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Bapenda	10 unit	171.884.721,00	APBD KAB	10 unit	200.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah yang disediakan tepat waktu	Bapenda		584.654.880,00	APBD KAB			586.654.880,00
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bapenda	12 laporan	3.833.000,00	APBD KAB	12 laporan	3.833.000,00	
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Bapenda	12 laporan	183.720.000,00	APBD KAB	12 laporan	185.720.000,00	
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Peneyedian jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	Bapenda	12 laporan	397.101.880,00	APBD KAB	12 laporan	397.101.880,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah dalam Kondisi baik	Bapenda	100 %	490.500.000,00	APBD KAB	100%		497.000.000,00
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan Bayarkan pajak dan perizinannya	Bapenda	18 unit	207.000.000,00	APBD KAB	20 unit	207.000.000,00	
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan Mesin lainnya yang dipelihara	Bapenda	58 unit	83.500.000,00	APBD KAB	59 unit	90.000.000,00	
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Bapenda	1 unit	200.000.000,00	APBD KAB	1 unit	200.000.000,00	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan pajak Daerah		2,60%	14.597.730.070,32			3,03%	15.155.289.784,40
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan Pajak daerah	Bapenda	100%	14.597.730.070,32	APBD KAB	100%	15.155.289.784,40	
	1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	2 dokumen	85.974.800,00	APBD KAB	2 dokumen	104.432.243,12	
	2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis pajak Daerah serta Pengembangan pajak daerah dan kebijakan Daerah	Bapenda	27 dokumen	307.659.900,00	APBD KAB	29 dokumen	330.670.000,00	

3.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	32 laporan	1.250.000.000,00	APBD KAB		33 laporan	1.338.376.241,67
4.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	14 unit	1.089.628.400,00	APBD KAB		16 unit	1.100.000.000,00
5.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Daerah, Subyek Pajak dan Wajib pajak daerah	Bapenda	4 laporan	3.017.621.950,00	APBD KAB		4 laporan	3.225.000.000,00
6.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan basis data Pajak Daerah	Bapenda	10 laporan	200.000.000,00	APBD KAB		10 laporan	250.000.000,00
7.	Penilaian Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanahdan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek Pajak yang disesuaikan NJOPNya	Bapenda	25 Objek Pajak	185.000.000,00	APBD KAB		25 objek pajak	185.000.000,00
8.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Bapenda	821.700 dokumen	45.120.000,00	APBD KAB		831.800 dokumen	50.000.000,00
9.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Junlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda	1600 layanan	180.000.000,00	APBD KAB		1700 layanan	200.000.000,00
10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penilaian dan verifikasi	Bapenda	-	-	APBD KAB		-	-
11.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Hasil pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	740.530 dokumen	4.237.171.554,32	APBD KAB		749.620 dokumen	4.301.811.299,61
12.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Hasil Penyelesaian Kebertan pajak Daerah	Bapenda	-	-	APBD KAB			-
13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan pajak Daerah	Bapenda	495 Dokumen	3.218.000.000,00	APBD KAB		495 dokumen	3.250.000.000,00
14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi daerah	Bapenda	390 laporan	556.553.466,00	APBD KAB		420 laporan	570.000.000,00
15.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bapenda	4 laporan	225.000.000,00	APBD KAB		4 laporan	250.000.000,00

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2026 bertujuan menetapkan panduan dan arah pembangunan di bidang pendapatan Kabupaten Blitar, sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar. Proses penyusunan Rencana Kerja ini melibatkan seluruh pihak terkait, sehingga semua pihak di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar merasa diapresiasi, terwakili, dan ikut bertanggung jawab atas program kerja yang direncanakan. Beberapa poin penting terkait optimalisasi penerimaan pendapatan meliputi:

1. Melaksanakan perubahan tata kelola pemungutan Pajak MBLB yang baru, dengan dipasangnya Pos-pos pengawasan MBLB pada 14 titik strategis yang ada di Seluruh Kabupaten Blitar;
2. Melaksanakan SISMIOP, yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan PBB yang tertib administrasi, adil, efisien, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan pendapatan daerah;
3. Melaksanakan Program Pendataan Bangunan Bersama Kelurahan dan Desa, yang bertujuan untuk memutakhirkan data objek pajak secara akurat, memperluas basis pajak, meningkatkan potensi penerimaan PBB-P2, serta memperkuat peran perangkat desa/kelurahan dalam mendukung administrasi perpajakan daerah;
4. Menciptakan kolaborasi dengan stakeholder terkait melalui sinergi program dan kegiatan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
5. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam menyelesaikan piutang yang terus bertambah setiap tahun;
6. Melibatkan pihak ketiga dan aparaturnya untuk menyelesaikan masalah basis data pajak yang belum akurat dan valid;
7. Berkolaborasi Bersama dengan Bapenda Provinsi (Operasi Gabungan) untuk kegiatan Cost Sharing PKB dan BBNKB;
8. Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan dan Pembayaran.
9. Optimalisasi pelaksanaan Rencana Kerja;

Beberapa poin penting diatas sebagai catatan yang merangkum arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar pada Tahun 2026 mendatang, Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan BAPENDA mengacu kepada Regulasi yang telah ditetapkan;
2. Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2026 dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2026, yang pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatannya wajib didukung data bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif;
3. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Blitar, keberadaan Renja Badan Pendapatan Daerah harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah (RKA- BAPENDA).

Semoga Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2026 dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait sehingga tujuan pembangunan daerah Kabupaten Blitar Tahun 2026 dapat tercapai. Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Blitar, Agustus 2026
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR



ASMANINGAYU DEWI L, S.T., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP.19780426 200212 2 011